

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amelia Cahyadini, et al. 2023. *Hukum Pengawasan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ardiansyah. 2025. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. 1994. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Candra, Mardi. 2024. *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: Prenada Media.
- Dermawan, et al. 2014. *Status Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Profil 113 Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.
- Dwiyanto, Agus. 2020. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, H. 2019. *Ekologi Perairan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2023. *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. Jakarta: PT Alumni.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi dan Edi As'Adi. 2022. *Hukum Administrasi Negara: Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*. Surakarta: Pustaka Iltizam.
- Handayaningrat, Soewarno. 2000. *Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi.** *Hukum Lingkungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Joseph. 2021. *Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*. Jakarta Selatan: Indocamp.
- Makmur. 2022. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Manulang, S. 2018. *Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. 2023. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2024. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nurcholis dan Hanif. 2023. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pramono, Budi. 2021. *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Pasolong, Harbani. 2022. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, Heri. 2023. *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahman, Arip. 2022. *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik (Konsep dan Aplikasi dalam Perwujudan Good Governance)*. Purwokerto: Amerta Media.
- Sagara, Yusar. 2021. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Depok: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sedarmayanti**. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Solikin, H. Nur. 2021. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardiman, Marjoni Rachman, dan Jamiah. 2023. *Birokrasi dan Public Governance*. Samarinda: Tahta Media Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Pengawasan dalam Administrasi Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Tomo. 2019. *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Jakarta Selatan: Indocamp.
- Wahid, A.M Yunus. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, Joko. 2023. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yayat Supriatna, H. 2020. *Revitalisasi Good Governance: Akselerasi ASN Berkualitas Melalui Diklat Prajabatan Pola Baru*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Jurnal

- Ahmad. 2020. Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 2.
- Amiruddin, R. 2019. Peran Zonasi Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir. *Jurnal Kelautan Indonesia*, Volume 5, Nomor 2.
- Bachtiar dan Setyawan. 2023. Pengembangan Kawasan Konservasi Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Volume 13, Nomor 1.
- Budiarto, S. 2020. Analisis Efektivitas Patroli Perairan Dalam KKPD Doboto. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Volume 7, Nomor 1.

- Fadhil, R. 2022. Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 17, Nomor 1.
- Fajar, D. dan P. Lestari. 2022. Model Kemitraan Pemerintah Daerah Dan LSM Dalam Konservasi Perairan. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 6, Nomor 1.
- Galih, R. 2020. Produktivitas Ikan Ekonomis Di Zona Rehabilitasi Doboto. *Jurnal Biota Laut*, Volume 8, Nomor 2.
- Kamaruddin, Hanim, dan kawan-kawan. 2022. Legal Aspect Of Plastic Waste Management In Indonesia And Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris. *Jurnal Sustainability*, Volume 14, Nomor 12.
- Nugroho, R. 2020. Strategi Pengawasan Dalam Manajemen Modern. *Jurnal Manajemen Kontemporer*, Volume 5, Nomor 3.
- Ramadhan, Moh. 2024. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Volume 3, Nomor 4.
- Rusandi, Andi, et al. 2021. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Marine Fisheries*, Volume 12, Nomor 2.
- Suryanto, H. 2021. Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Volume 7, Nomor 2.
- Suryanto, H. dan H. Prasetyo. 2021. Pengaruh Sistem Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, Volume 9, Nomor 2.
- Yusuf, M. dan La Sara. 2024. Analisis Perubahan Kondisi Tutupan Karang Hidup Di Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo. *Jurnal Sumberdaya Perairan Indonesia*, Volume 10, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kelompok Masyarakat Pengawas.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023-2042.

Website dan Laporan Resmi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021–2026*.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. 2025. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota*. <https://sulteng.bps.go.id/id/statistics-table>

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. 2018. *Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Doboto Sulawesi Tengah*.
DKP Sulteng. 2025. *Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Tengah*. <https://dkp.sultengprov.go.id>

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. 2024. *Bantuan KOMPAK Stimulasi Masyarakat Jaga Kawasan Konservasi Perairan Tolitoli*. <https://www.kkp.go.id>

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. 2021. *Data Kawasan Konservasi*. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. *Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia: Tantangan dan Peluang*.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2025. *Tugas dan Fungsi KKP*. <https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/kkp.html>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2025. *Keanekaragaman Hayati Untuk Keberlanjutan*. <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=eboee1>

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2025. *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. <https://www.komisiyudisial.go.id>

Kurniawati Agustin. 2025. *Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum*. <https://www.kompasiana.com>

LAN (Lembaga Administrasi Negara), 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI

Qotrun. 2021. *Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangkateori/>

Seliwati Daimanampa. 2024. *Menjaga Ekosistem Laut di Kabupaten Tolitoli*. <https://rri.co.id/daerah/744873/menjaga-ekosistem-laut-di-kabupaten-tolitoli>

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. 2025. *Tugas TNI Angkatan Laut*. <https://www.tnial.mil.id/tugas>

Yusuf Abdhul. 2025. *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian*. <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunderpenelitian/>

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sriyanti Dg. Parebba, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli pada tanggal 21 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Irfan Muin, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli pada tanggal 18 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Romi, warga Desa Pulias pada tanggal 26 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Jempe, warga Desa Pulias pada tanggal 26 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Aliyas, Kepala Desa Pulias Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli pada tanggal 16 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Isran, salah satu anggota POKMASWAS pada tanggal 19 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Franky Wijaya, dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) pada tanggal 28 Juli 2025